

Kerja sama makroekonomi G20 dalam mendukung *Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth*

Syurkani Ishak Kasim dan Regina Patricia Mboeik¹

Pendahuluan

Kepemimpinan Meksiko dalam proses kerja sama G20 selama tahun 2012 didominasi oleh situasi perekonomian global yang memburuk akibat permasalahan krisis utang pemerintah di kawasan Euro yang belum menunjukkan upaya ke arah pemulihan yang jelas. Keadaan ini diperparah oleh meningkatnya tekanan terhadap pasar keuangan global yang sebagian besar adalah konsekuensi dari meningkatnya kecemasan para investor terhadap kemungkinan terjadinya risiko *default* di negara-negara anggota kawasan Euro. Disamping itu beban utang negara maju dan melemahnya pertumbuhan semakin menunjukkan arah perekonomian global ke depan yang suram. Konsekuensi apabila kemungkinan terjadinya krisis yang parah adalah dampaknya kepada penurunan tingkat permintaan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama (Romer, 2012)

Lebih jauh, situasi ekonomi global juga dihadapkan kepada meningkatnya risiko geopolitik yang semakin meningkatkan tingkat volatilitas harga komoditas pertanian dan energi (International Monetary Fund, 2012). Disamping itu risiko geopolitik ini juga dapat mengancam kestabilan pemerintahan global (World Economic Forum, 2012). Hal ini sudah terlihat dari pergantian pimpinan di beberapa negara anggota kawasan Euro, dimana hasil pemilu terakhir memberikan ruang kepada pembentukan pemerintahan baru (contohnya, Yunani, Perancis, dan Italia). Selain itu, terdapat tanda-tanda bahwa telah terjadi *spillover* dari krisis di Eropa yang mulai dirasakan di belahan dunia lain, khususnya di *emerging market economies*, diantaranya terganggunya aktivitas ekspor ke negara-negara maju.

Salah satu contohnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengalami perlambatan pertumbuhan terutama di sektor manufaktur yang diakibatkan oleh tingginya ketergantungan ekspor RRT yang sangat tinggi ke wilayah Eropa dan Amerika Serikat dan berimbas secara keseluruhan kepada menurunnya tingkat produksi pabrikan di RRT. Dampak paling signifikan yaitu turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi RRT menjadi 8% dan memaksa negara tersebut untuk melakukan program stimulus (International Monetary Fund, 2012).

¹ Kedua penulis bekerja pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan. Penulis dapat dihubungi lewat email: rpmboeik@fiskal.depkeu.go.id.

Sementara itu G20 sebagai forum premier ekonomi global terus memperkuat koordinasi di antara negara anggotanya sebagai respon atas ketidakseimbangan global dan situasi krisis yang terjadi. G20 juga secara bersama-sama menyepakati respon jangka pendek terhadap krisis kawasan Euro khususnya mengenai langkah rekapitalisasi perbankan, resolusi terhadap krisis Yunani, dan upaya mencegah penularan krisis ke negara yang lebih besar dan sistemik. Upaya koordinasi tersebut direfleksikan melalui penguatan mekanisme *Mutual Assessment Process* (MAP) melalui *Framework Working Group*. Hal ini penting karena terjadi asimetri di antara anggota kawasan Euro dalam melaksanakan komitmen terkait perbaikan strukturalnya.

Oleh karena itu penguatan kerja sama makroekonomi di G20 menjadi sangat krusial dan untuk ini G20 menetapkan berbagai mekanisme untuk melaksanakan proses kerja sama di bidang makroekonomi tersebut, dengan tujuan akhir kepada pencapaian sebuah kerangka pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan dan berimbang (*the Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth - FSSBG*). Proses koordinasi yang dilakukan oleh G20 tersebut dijabarkan secara lebih lengkap dalam pembahasan-pembahasan berikut.

Framework for growth

Framework Working Group (FWG) merupakan kelompok kerja yang telah dibentuk oleh para pemimpin G20 sebagai jangkar dari seluruh kesepakatan G20 dan sebagai mekanisme untuk memfokuskan berbagai isu yang dibahas di G20 serta untuk menyampaikan pesan yang koheren dan komprehensif kepada publik mengenai bagaimana G20 berkontribusi pada ekonomi global. Pelaksanaan FWG ini ditetapkan pada level deputy keuangan, dimana pada awal tahun Ketetuaan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rangka perumusan rekomendasi kepada menteri keuangan dan gubernur bank sentral dan pada puncaknya menjadi ketetapan pada tingkat kepala pemerintahan.

Mekanisme kerja FWG saat ini masih diarahkan untuk mencapai tujuan bersama *Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth (Framework for Growth)* yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota G20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 2009 yang menjadi refleksi atas dorongan untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh dalam rangka mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi pada tahun 2007/2008. Lebih jauh keberadaan kerangka kerja sama untuk penguatan fondasi pertumbuhan ini juga ditujukan untuk menata kembali fondasi

pertumbuhan yang kuat guna mencegah terjadinya kembali krisis keuangan global di masa mendatang.

Dalam inisiatif Framework, terdapat beberapa kerangka kerja yaitu:

- a) *Mutual Assessment Process* (MAP) yang merupakan proses peer review dan sharing kebijakan terkait komitmen untuk melakukan berbagai kebijakan yang dapat diperhitungkan dampak atau hasilnya dalam waktu satu dua tahun ke depan. Dalam MAP ini juga dimuat proyeksi ekonomi domestik anggota G20 untuk mencapai tujuan Framework, dimana dalam hal ini dilakukan *accountability assessment* atas komitmen masing-masing negara anggota dari tahun ke tahun;
- b) Penyusunan *baseline projection* ekonomi global yang menjadi indikator keberhasilan koordinasi kebijakan ekonomi G20 secara kelompok. Dalam hal ini dilakukan assessment oleh IMF untuk seluruh negara anggota G20 untuk melihat kinerja ekonomi G20 dalam melaksanakan komitmen untuk pencapaian Framework;
- c) *External Sustainability Assessment* yang merupakan inisiatif spesifik dalam kerangka Framework yang bertujuan menganalisa kondisi/potensi ketidakseimbangan perekonomian (imbalances) dari tujuh negara anggota G20 yang dipandang dalam sistemik dalam konteks perekonomian global berdasarkan skala perekonomian nasionalnya (AS, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, China, India).

Mekanisme koordinasi antar negara anggota G20, yang secara akumulatif memegang 80% volume PDB dunia, telah terbukti efektifitasnya sejak dari pelaksanaan KTT G20 di Washington DC, kemudian dilanjutkan dengan KTT London, dan Pittsburgh. Terakhir komitmen negara anggota G20 tersebut diperkuat dan diperluas menjadi lebih komprehensif dalam KTT G20 berikutnya di Toronto Kanada.

Mutual Assessment Process (MAP)

Mengingat proses tersebut dilaksanakan melalui proses evaluasi oleh sesama negara anggota dan dibantu oleh IMF untuk penilaian kinerja G20 secara keseluruhan, maka mekanisme ini disebut juga dengan *Mutual Assessment Process* atau MAP. Melalui MAP, negara anggota G20 sepakat untuk bekerja secara bersama-sama dalam merumuskan kebijakan yang terkoordinasi (*coordinated policy*) guna mencapai sasaran pembangunan dalam jangka menengah. Dalam melakukan proses MAP, keterlibatan IMF sesuai mandat

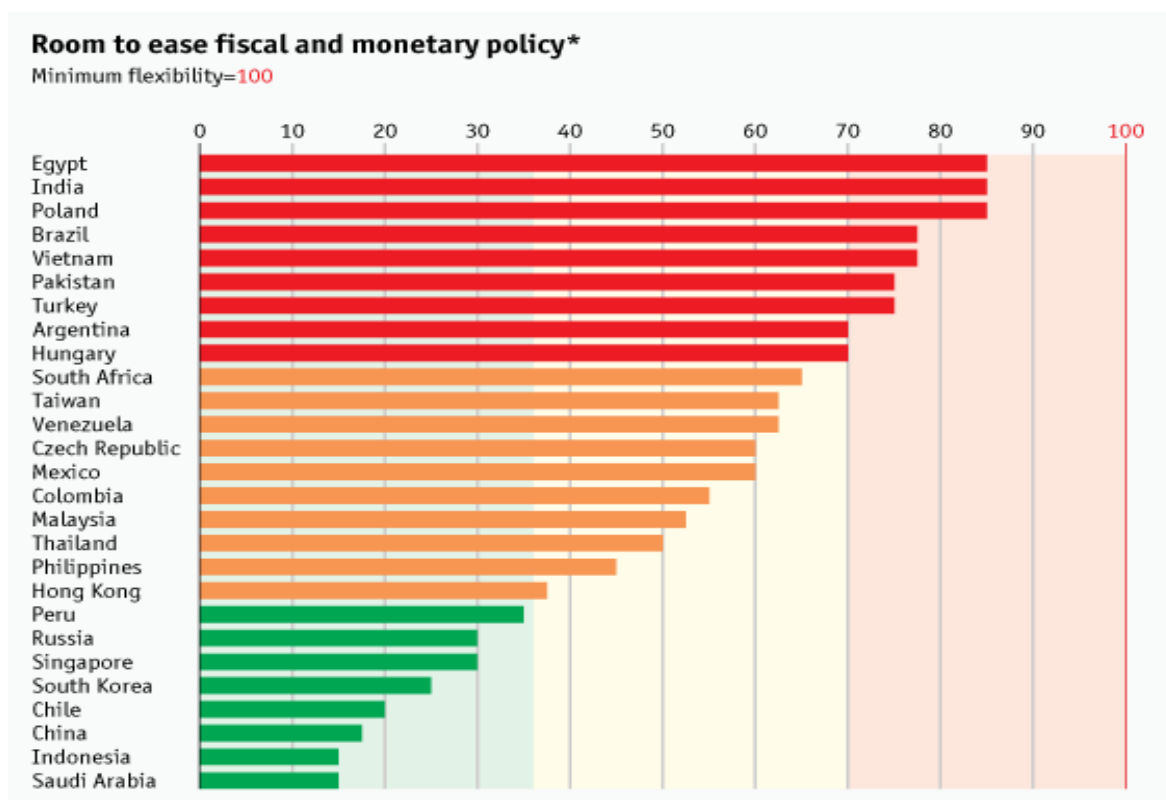
adalah dalam hal melakukan analisa apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan anggota G20 telah sesuai dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang disepakati oleh negara anggota G20 sendiri, baik yang terkait dengan sasaran negara anggota secara individual maupun secara kelompok. Konsistensi komitmen oleh negara anggota menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan bersama tersebut.

Oleh karenanya koordinasi kebijakan ekonomi G20 yang dituangkan dalam MAP dapat dilihat sebagai sebuah momentum dan tekad bersama seluruh negara anggota untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dunia dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal ini dapat terlihat secara nyata dalam respon G20 sendiri terhadap krisis global tahun 2008, dimana seluruh negara anggota G20 secara bersama-sama dalam usaha-usaha yang terarah (*concerted efforts*) berhasil menyepakati komitmen-komitmen makroekonomi, seperti penyediaan stimulus fiskal untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi, penerapan instrumen-instrumen moneter untuk menjaga stabilitas harga, perumusan strategi-strategi untuk menjaga ketahanan fiskal dalam jangka panjang. Komitmen-komitmen ini juga dikaitkan dengan upaya untuk meminimalisir dampak sosial dari krisis terhadap negara-negara berkembang lain dan negara-negara miskin, serta melanjutkan koordinasi kebijakan dalam mengembangkan tujuan bersama yaitu upaya pemulihan yang berorientasi pada pertumbuhan yang kuat, berkesimbangan, dan berimbang (*Strong, Sustainable, and Balanced Growth*).

Secara lebih spesifik, dalam penyusunan MAP, setiap negara anggota menyampaikan komitmen kebijakan nasionalnya dalam empat bagian, yaitu kebijakan yang terkait fiskal domestik, kebijakan yang terkait dengan sistim moneter, kebijakan yang dilakukan dalam rangka reformasi sektor keuangan, serta kebijakan-kebijakan dalam mendukung pelaksanaan reformasi struktural, khususnya yang mempengaruhi langsung upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan dan berimbang oleh masing-masing negara anggota G20.

Dalam implementasi MAP selama ini, komitmen yang terkait dengan kebijakan fiskal diarahkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Negara anggota G20 yang memiliki ruang fiskal yang kecil akibat dari tingginya rasio utang terhadap PDB dan defisit anggaran yang relatif cukup besar, maka akan diarahkan kepada pencapaian konsolidasi fiskal dalam jangka menengah. Namun demikian negara tersebut juga harus menyampaikan komitmennya terkait pelaksanaan kebijakan fiskal jangka pendek agar secara konsisten tidak

menghambat tujuan pencapaian konsolidasi fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sementara itu negara yang memiliki ruang fiskal yang cukup luas, ditandai dengan rendahnya rasio utang terhadap total PDB serta defisit anggaran yang relatif kecil (<3%), maka kebijakan yang diambil untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan dan berimbang sebagaimana disepakati dalam KTT Pittsburgh diarahkan untuk meningkatkan tingkat permintaan domestik serta bahkan dapat mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi fiskal melalui peningkatan belanja pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi.



Sumber: The Economist (Januari 2012)

Tabel di bawah menunjukkan penentuan skala prioritas yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota sesuai dengan kondisi fiskal masing-masing, dimana negara anggota yang termasuk kategori negara maju dan mengalami surplus disarankan untuk melakukan perbaikan sektor ekonomi domestik melalui reformasi sektor tenaga kerja. Sementara itu negara emerging yang memiliki surplus anggaran seperti RRT dan Indonesia diharapkan melakukan berbagai upaya untuk peningkatan permintaan domestik dalam rangka mencapai keseimbangan perekonomian global. Namun demikian seiring perkembangan perekonomian global, pembagian negara melalui kategori sebagaimana dalam tabel tersebut menjadi tidak tetap. Oleh karenanya, G20 menetapkan agar komitmen

oleh negara anggota harus dilihat secara lebih pragmatis yang tertuang dalam satu MAP, dimana berisikan komitmen-komitmen terkait fiskal yang akan dicapai dalam satu atau dua tahun ke depan.

	Surplus	Deficit
	Accelerate financial repair and reform	
Advanced economies	Product and labor market reforms	Credible fiscal consolidation over the medium term
Emerging economies	Rebalancing of demand towards domestic sources	Supply measures to strengthen growth and employment

Dengan semakin cepatnya perubahan kondisi perekonomian global diperparah dengan memburuknya krisis utang pemerintah di kawasan Euro, maka G20 menyepakati sejak tahun 2011 untuk merumuskan rencana aksi yang lebih tegas dan kongkrit yang berisikan poin-poin dan rekomendasi untuk implementasi komitmen-komitmen yang sudah disepakati selama secara lebih tegas oleh seluruh negara anggota. Dalam rencana aksi yang dibuat disusun secara sistematis dorongan kepada masing-masing negara anggota untuk mau melakukan berbagai kebijakan walaupun dalam jangka pendek mungkin akan memberikan dampak terhadap turunnya prospek pertumbuhan, namun dalam jangka panjang akan memperbaiki sistem perekonomian global.

Sampai saat ini para pemimpin G20 telah menetapkan dua rencana aksi (Cannes Action Plan dan Los Cabos Action Plan) yang berisikan mekanisme pelaksanaan komitmen dan kerja sama makroekonomi antar negara anggota G20. Disamping itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga menyepakati adanya tambahan alat ukur untuk melihat implementasi komitmen masing-masing negara anggota yang dirangkum dalam *Accountability Assessment*. Penjelasan masing-masing rencana aksi dan assessment disampaikan di bawah ini.

Cannes Action Plan

Cannes Action Plan, yang dihasilkan pada presidensi G20 oleh Perancis tahun sebelumnya, merupakan upaya G20 untuk mendorong negara anggotanya dapat lebih konsisten dan tegas dalam melaksanakan berbagai komitmen terkait penguatan posisi fiskal, moneter, sektor keuangan dan reformasi struktural yang mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dalam jangka panjang. Adanya Cannes Action Plan dilakukan dalam paruh kedua tahun presidensi Perancis di G20, dan hal ini dapat dipahami mengingat gejala krisis mencapai kulminasi pada semester kedua tahun 2011.

Perumusan Cannes Action Plan secara lebih spesifik diwarnai dengan perlambatan angka pertumbuhan dan situasi krisis Eropa yang memuncak pada hampir penghujung tahun 2011. Di tengah kondisi perekonomian global yang semakin memburuk, terutama akibat belum adanya penyelesaian krisis Eropa yang dianggap kredibel, G20 mendapatkan tekanan yang kuat dari masyarakat internasional untuk menghasilkan kesepakatan berupa respon jangka pendek untuk membantu kawasan Euro mengatasi krisis dan menenangkan kondisi pasar. Hal ini sesuai dengan tujuan G20 sendiri untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian global secara keseluruhan (Spence, 2011). Oleh karenanya Cannes Action Plan dihasilkan dari kesepakatan negara anggota G20 dalam merespon kebutuhan ekonomi dunia untuk mengatasi tantangan jangka pendek, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan dalam jangka menengah.

Dalam action plan tersebut, negara maju berkomitmen untuk mengimplementasikan program konsolidasi fiskal secara lebih ambisius dengan memperhatikan dampak terhadap output dalam jangka pendek, serta meningkatkan upaya mereformasi sektor keuangan. Namun secara berimbang, *emerging markets* yang mengalami surplus serta negara maju yang mengalami defisit (dalam *current account*) berkomitmen untuk mengatasi pola saving jangka panjang dalam rangka *rebalancing global demand* dan didukung oleh peningkatan fleksibilitas nilai tukar.

Sementara itu, dalam memperkuat pemulihan pertumbuhan ekonomi global jangka menengah, negara G20 berkomitmen untuk mengambil kebijakan konkrit dalam mengimplementasikan konsolidasi fiskal, upaya global demand rebalancing, reformasi struktural dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, reformasi sistem keuangan global dan domestik, mendorong perdagangan dan investasi terbuka, dan mendukung langkah-langkah nyata dalam mendorong agenda pembangunan. Selain itu,

negara G20 menegaskan kembali komitmennya dalam program reformasi struktural khususnya terkait peningkatan kualitas tenaga kerja, produktivitas dan reformasi pada labor market.

Dalam Cannes Action Plan, Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki ketahanan fiskal yang kuat, sehingga akan membiarkan *automatic fiscal stabilizer* manakala situasi ekonomi global semakin memburuk. Indonesia juga diakui sebagai negara yang sedang melakukan phasing-out subsidi BBM secara gradual dengan memperhatikan dampak bagi masyarakat miskin, serta diakui sebagai negara yang memiliki framework untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Los Cabos Action Plan

Senada dengan situasi yang menjiwai kesepakatan Cannes Action Plan, sejak pelaksanaan KTT Cannes tahun 2011, outlook pertumbuhan ekonomi dunia belum menunjukkan penguatan sebagaimana diharapkan, namun cenderung mengarah kepada terjadinya *downside risk scenario* serta didukung tingkat pengangguran yang tetap tinggi. Untuk itu, Los Cabos Action Plan disusun untuk memperkuat komitmen yang telah disepakati dalam Cannes Action Plan dengan mengatur kembali langkah-langkah kebijakan jangka pendek dalam memitigasi *downside risk* tersebut, sekaligus untuk tetap melaksanakan komitmennya semula dalam mendorong pertumbuhan yang kuat dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mencapai kesepakatan atas langkah kebijakan yang tercermin dalam Los Cabos Action Plan, negara G20 melewati proses yang diketuai oleh Mexico dan khususnya dimotori oleh kelompok kerja Framework untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam upaya mencapai pemulihan atas situasi krisis dan pertumbuhan ekonomi global, dengan mempertimbangkan dan mengevaluasi progress implementasi komitmen jangka pendek yang telah disepakati pada KTT sebelumnya, yaitu Cannes Action Plan, yang hanya berjarak 6 bulan sebelumnya, untuk selanjutnya menyepakati langkah kebijakan yang perlu ditambahkan guna mengatasi kondisi krisis dan pelemahan pertumbuhan yang terjadi.

Setelah berlangsungnya KTT Cannes, telah disepakati bahwa proses dalam kelompok kerja Framework sepanjang presidensi Mexico akan mencerminkan *follow up* dari action plan yang disepakati pada Cannes Summit. Proses Framework berfokus pada tiga bidang utama, yaitu memastikan bahwa komitmen sebelumnya dilaksanakan dan bahwa anggota

bertanggung jawab untuk melakukannya; memastikan bahwa perkembangan ekonomi global dan risiko yang terkait juga ditentukan, dan bahwa langkah-langkah kebijakan perbaikan diidentifikasi dan dilakukan, serta; mengembangkan Los Cabos Action Plan berdasarkan pada Cannes Action Plan, untuk mendorong pemulihan ekonomi global dan mempromosikan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang dan penciptaan lapangan kerja.

Los Cabos Action Plan merupakan bentuk kontribusi G20 terhadap pemulihan situasi krisis ekonomi global melalui penguatan langkah kebijakan yang terkoordinasi dan disepakati untuk secara bersama-sama mencapai kerangka pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang (*Framework for Strong, Sustainable, and Balanced Growth*). Dalam action plan tersebut diantaranya memuat dukungan G20 atas percepatan penyelesaian krisis utang pemerintah Eropa dan krisis perbankan di Eurozone, dan juga menyepakati serangkaian langkah kebijakan yang terkoordinasi dan berorientasi jangka pendek dan menengah, serta dengan mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara anggota G20. Langkah-langkah kebijakan yang disepakati tersebut diantaranya memperkuat stabilitas sistem keuangan yang salah satunya dari memitigasi risiko-risiko *deleveraging*, mendorong *domestic demand* dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, terus mendorong implementasi konsolidasi fiskal di negara maju dengan lebih berorientasi pada upaya mencapai pemulihan keseimbangan global, baik ketidakseimbangan internal maupun eksternal, demikian negara emerging juga perlu memperkuat kebijakan pertumbuhan yang mendukung keseimbangan global dan penciptaan lapangan kerja.

Selain menghasilkan Los Cabos Action Plan, G20 juga menyepakati penguatan fungsi monitoring dan penilaian terhadap progress dari komitmen masing-masing negara dalam menjaga konsistensi dan komitmen masing-masing negara G20. Konsistensi komitmen G20 dalam mencapai *Strong, Sustainable, and Balanced Growth* perlu diselaraskan dengan “upside scenario”, sehingga komitmen tersebut tidak menjadi hal yang “business as usual”. Dengan demikian kebijakan yang disampaikan benar-benar menjadi fondasi koordinasi G20 untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang.

Sebagai bagian dari kesepakatan negara G20 untuk menciptakan mekanisme evaluasi atas perkembangan pelaksanaan komitmen-komitmen oleh masing-masing negara G20 sebagaimana dimuat dalam dokumentasi Summit/KTT (baik Communiqué, Declaration, dan Action Plan) bahkan sejak Pittsburgh Summit tahun 2009, maka dihasilkan pula *Los Cabos*

Accountability Assessment Framework. Mekanisme penilaian akuntabilitas ini bersandar pada 3 (tiga) pilar yaitu,

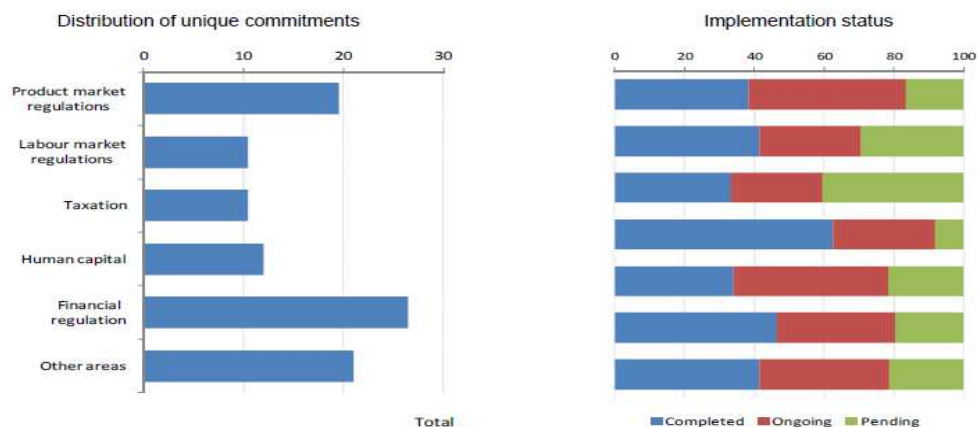
1. *guiding principle* yang mengatur prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan penilaian ini. Prinsip utamanya adalah bahwa pihak penentu dalam penyusunan hasil penilaian akuntabilitas ini tetap berada di tangan negara anggota karena metode penilaian yang digunakan adalah melalui proses *reporting* atas komitmen yang telah dilaksanakan serta melalui proses klarifikasi (*comply and explain approach*). Penggunaan indikator yang terukur juga digunakan untuk mengevaluasi efektifitas implementasi kebijakan yang dijalankan.

Penilaian akuntabilitas ini kemudian digunakan oleh negara anggota G20 dalam mengevaluasi kinerjanya masing-masing, baik untuk merefleksikan sejauh mana perkembangan implementasi kebijakan domestiknya, pengaruhnya terhadap perekonomian global, maupun sebagai perangkat dasar untuk menentukan langkah kebijakan koordinatif lebih lanjut yang secara kolektif perlu disiapkan dalam forum G20, melalui proses dialog yang terbuka termasuk terhadap masukan dan analisa dari pihak ketiga yang independen (seperti IMF dan organisasi internasional yang relevan) untuk meningkatkan kredibilitas penilaian ini. Hasil penilaian akuntabilitas juga akan dipublikasikan secara transparan setelah tercapai kesepakatan diantara negara G20.

2. adanya *peer review process* yang merupakan proses utama dari kerangka penilaian ini. Proses yang berlangsung dalam kelompok kerja *Framework* ini difokuskan untuk menilai apakah anggota G20 sudah memenuhi komitmen mereka atas komitmen di bidang fiskal, moneter/nilai tukar, sektor keuangan, dan komitmen reformasi struktural. Proses penilaian akuntabilitas ini akan diarahkan melalui diskusi yang teratur dan terstruktur untuk membahas kemajuan terhadap komitmen yang telah disepakati disetiap pertemuan kelompok kerja *Framework*.
3. adanya mekanisme pelaporan hasil penilaian akuntabilitas Deputi dan Menteri serta Gubernur pada pertemuan G20. Dalam hal ini, IMF dan organisasi internasional yang relevan lainnya berperan penting dalam memberikan masukan untuk menjaga obyektivitas dan kredibilitas dari penilaian tersebut. Masukan tersebut disampaikan melalui penyiapan laporan resmi yang memuat kemajuan pemenuhan komitmen oleh negara G20 sebelum Summit dilangsungkan dan selanjutnya untuk dipublikasikan secara terbuka.

Accountability Assessment

Dalam *Los Cabos Accountability Assessment* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari *The Los Cabos Growth and Jobs Action Plan* disampaikan bagaimana negara G20 dianggap telah menunjukkan komitmennya terhadap kesepakatan yang dihasilkan sejak Pittsburgh 2009. Namun, serangkaian langkah konkrit atas komitmen tersebut masih dianggap perlu ditambahkan dalam rangka merespon situasi perekonomian yang dinamis dan tak terduga sebelumnya, misalnya dalam mengatasi semakin melebarnya jarak ketidakseimbangan global. Sebagai contoh, beberapa negara maju dianggap telah secara bertahap mencapai target pengurangan defisit (*debt-to-GDP-ratio*) yang disepakati dalam Toronto Summit dalam upaya melakukan stabilisasi ekonomi, kecuali beberapa negara maju yang saat ini masih dilanda krisis.



Sumber: OECD (2012)

Demikian juga halnya terkait pelaksanaan reformasi struktural, beberapa negara dianggap telah mengimplementasikan komitmennya seperti penguatan kerangka fiskal dengan mengadopsi *Fiscal Compact* oleh negara-negara di kawasan Euro, reformasi di sektor dana pensiun (Italia, Perancis, Inggris, Brazil), reformasi di pasar tenaga kerja (Brazil). Implementasi komitmen ini dapat dilihat dalam gambar di atas. Namun, beberapa kebijakan terkait reformasi struktural masih perlu dijalankan dalam rangka reformasi tata kelola keuangan publik yang berkelanjutan dan secara global mendukung upaya penyeimbangan global, diantaranya reformasi tata kelola fiskal di kawasan Euro; penyesuaian yang lebih ambisius terhadap fiskal jangka menengah di Amerika dan Jepang; melanjutkan reformasi di bidang subsidi di negara-negara seperti India, Mexico, dan termasuk Indonesia; serta reformasi perpajakan di negara maju dan emerging dalam rangka mengurangi distorsi.

Partisipasi Indonesia dalam kerja sama makroekonomi G20

Indonesia selama ini telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan maupun peer review proses dari kerja sama makroekonomi di G20, khususnya dalam kerangka FSSBG. Indonesia memiliki pandangan bahwa penguatan sistim monitoring dalam implementasi setiap komitmen menjadi sangat krusial karena dari sistim monitoring tersebut dapat diketahui progress dari masing-masing negara anggota dalam melaksanakan MAP mereka.

Ada beberapa isu kontroversial yang diangkat dalam pembahasan Framework di G20 dimana Indonesia belum memiliki pandangan yang kuat, antara lain yang meliputi rencana penyusunan *principles for exchange rate and fiscal policy management* dalam rangka meningkatkan disiplin masing-masing negara baik terkait kebijakan moneter maupun dalam hal pelaksanaan kebijakan fiskal. Dalam hal ini Indonesia menginginkan agar dilakukan kajian yang lebih dalam dan komprehensif sebelum G20 menetapkan satu kesepakatan baru yang akan mempengaruhi pelaksanaan proses monitoring implementasi MAP.

Namun demikian, bagi Indonesia dilakukannya percepatan penyampaian update national policy untuk Framework (MAP) sangat penting, sehingga proses untuk melakukan assessment dan selanjutnya perbaikan data dan update informasi perkembangan terbaru dari negara anggota dapat dilakukan. Dalam hal ini, bagi Indonesia, peranan IMF untuk melakukan koordinasi secara efektif akan sangat membantu negara anggota G20 untuk memenuhi tenggat waktu penyampaian disertai dengan kualitas data yang standar dengan seluruh negara anggota G20 lainnya.

Indonesia dalam forum G20 juga dipandang sebagai negara yang secara tegas mendukung penugasan kepada IMF untuk menyiapkan *sustainability report* yaitu menilai secara khusus tujuh negara anggota yang dipandang memiliki dampak sistemik bagi perekonomian global. Ketujuh negara tersebut yaitu Amerika Serikat, RRT, India, Jepang, Inggris, Perancis dan Jerman. Pemilihan ketujuh negara sistemik ini dilakukan dengan melihat ukuran PDB dalam skala global dan juga pengaruh yang ditimbulkan negara-negara tersebut terhadap banyak negara lain apabila terjadi goncangan di ekonomi domestik.

Disamping itu, Indonesia juga mendukung dilakukan assessment khusus kepada ekonomi kawasan Euro melihat pengaruh besar dari kesatuan wilayah ini terhadap perekonomian global. Hanya dalam praktek selama ini, mengingat tidak semua negara

anggota dalam kawasan Euro (Eurozone) yang memiliki satu mata uang bersama adalah juga anggota G20, maka assessment untuk pelaksanaan komitmen oleh kawasan Euro belum dapat dicapai secara lebih optimal, dibandingkan dengan negara-negara anggota lain yang individual.

Secara lebih spesifik, Indonesia menginginkan agar G20 tetap memberikan fokus yang tinggi kepada implementasi *policy commitment* yang telah disepakati baik dalam KTT Cannes maupun KTT Los Cabos, bahkan seluruh komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Dalam mendukung sasaran ini, Indonesia memandang penting agar penyusunan *national policy template* harus terus dilaksanakan dengan tambahan *policy commitment* yang dipandang perlu, mengingat MAP adalah usulan komitmen oleh negara anggota G20.

Komitmen Kebijakan Makroekonomi Indonesia

Terkait penyampaian data dan informasi ke G20 untuk komitmen pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, Indonesia membagi submisi ke dalam empat bagian sesuai template yang disiapkan oleh G20, yaitu:

- Dalam hal komitmen di bidang fiskal, Indonesia selama ini telah menyatakan akan menjaga secara konsisten defisit fiskal yang rendah (dibawah angka 3%) dan rasio utang terhadap PDB yang menurun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan potensi sumber pembiayaan domestik, baik terkait kebutuhan pendanaan pembangunan maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakan stimulus fiskal. Disamping itu, Indonesia juga secara konsisten meningkatkan proses perumusan dan efektivitas belanja pemerintah termasuk yang terkait dengan mekanisme subsidi maupun untuk meningkatkan kualitas belanja modal. Lebih jauh, komitmen di bidang fiskal juga diarahkan kepada peningkatan kualitas penyelenggaraan desentralisasi fiskal dalam rangka mendukung efisiensi belanja dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berimbang di seluruh wilayah.
- Di bidang kebijakan moneter dan nilai tukar, dalam penyampaian komitmen kepada G20, Indonesia selama ini terus melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan di bidang nilai tukar disertai dengan implementasi *policy mix* yaitu kebijakan moneter dan makroprudential dalam rangka mengelola inflasi yang

terkendali serta mengurangi volatilitas nilai tukar. Tujuan dari pelaksanaan kebijakan moneter tersebut yaitu untuk dalam jangka menengah mencapai target penurunan tingkat inflasi sehingga sejajar dengan level inflasi di tingkat regional. Disamping itu, Indonesia terus berusaha untuk mengelola dengan baik aliran modal yang masuk dalam rangka stabilitas makroekonomi sebagai fundamental pertumbuhan ekonomi.

- Terkait komitmen di bidang kebijakan sektor keuangan, baik perbankan dan non-perbankan, Indonesia menekankan pada penguatan kecukupan modal bagi perbankan dalam rangka memperkuat likuiditas sektor perbankan sehingga memenuhi ketentuan standar internasional. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan untuk menyelesaikan implementasi Basel II dan mulai mendalami penerapan Basel III terkait standar likuiditas perbankan. Disamping itu terkait kebijakan di bidang non perbankan, Indonesia telah menyatakan komitmen ke G20 untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pengesahan UU Jaring Pengaman Keuangan yang bertujuan untuk meletakkan fondasi yang kuat dalam rangka koordinasi pencegahan krisis ekonomi dan keuangan di masa mendatang.
- Dalam kaitan menyampaikan komitmen di bidang implementasi reformasi struktural, Indonesia telah menyatakan akan terus melaksanakan reformasi administrasi perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi sekaligus memfasilitas pembiayaan perdagangan. Lebih jauh, Indonesia juga menyatakan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui dukungan terlaksananya sistem Kemitraan Publik dan Swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Tindakan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas regulasi khususnya untuk mengurangi masalah bottleneck, serta dalam jangka panjang mendorong penurunan tingkat kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perluasan kegiatan usaha ekonomi termasuk kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Langkah Ke Depan

Terkait langkah ke depan dalam kerja sama makroekonomi di G20, Indonesia sebaiknya mengusulkan agar cara pandang sebagian besar negara di dunia terkait krisis yang terjadi saat ini dapat berubah. Cara pandang konvensional dimana faktor ekonomi tradisional sebagai penyebab terjadinya krisis harus diperbarui dan dalam hal ini negara maju harus menerima kenyataan bahwa poros ekonomi dunia saat ini telah bergeser. Oleh karenanya

perlu dirumuskan koordinasi makroekonomi yang mengedepankan norma-norma baru, yang bercirikan pembahasan agenda ekonomi global tidak lagi dilakukan secara satu arah (negara maju mendikte negara berkembang). Dalam kaitan ini, seiring dengan semakin kuatnya kecenderungan perekonomian bergeser menjadi multipolar, maka pembahasan agenda global juga harus dilakukan dengan mengakomodasi negara emerging dalam perumusan kebijakan di tingkat global dengan tingkat kepentingan yang lebih sejajar.

Oleh karenanya Indonesia dapat mengusulkan kepada G20 agar diciptakan mekanisme koordinasi makroekonomi dengan memperhatikan kepentingan semua negara, tanpa negara maju merasa lebih superior terkait pemenuhan komitmen mereka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan tingkat kepercayaan di masing-masing negara anggota G20 yang beragam sebagai akibat kondisi krisis saat ini, seharusnya G20 masih tetap dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi dunia. Hal ini dapat dicapai tidak saja karena didukung oleh konsistensi implementasi komitmen oleh negara maju, juga dukungan reformasi dan perbaikan pasar domestik di negara emerging akan sangat penting dalam rangka mengurangi ketidakseimbangan global (Indrawati, 2012).

Indonesia juga dapat terus menyuarakan agenda-agenda baru untuk menjadi pokok bahasan (*mainstreaming*) di pembahasan Framework antara lain dalam hal pembiayaan infrastruktur. Dalam hal ini, G20 dipandang mampu untuk mendeliver komitmen yang disepakati karena efektivitas mekanisme yang diciptakan di dalamnya. G20 tidak perlu lagi dilihat sebagai sebuah forum yang memiliki keanggotaan yang beragam (*balance of member states*). Disini G20 dituntut untuk mampu mengedepankan efektivitas masing-masing negara anggota dalam mencapai komitmen sesuai dengan kesiapan dan karakteristik ekonomi, tidak hanya efektivitas G20 sebagai sebuah kelompok gabungan negara maju dan negara berkembang. Oleh karenanya dalam rangka memperkuat koordinasi makroekonomi tersebut, perlu ditingkatkan konsultasi informal di antara negara-negara anggota, khususnya terkait isu-isu baru yang dibicarakan di Framework, antara lain pembiayaan infrastruktur dan peningkatan konsolidasi fiskal dalam jangka panjang. Dengan begitu, G20 akan tetap menjadi forum utama ekonomi global yang mampu memberikan solusi tidak saja bagi negara anggotanya namun juga bagi banyak negara lain di dunia.

Penutup

Tulisan ini memaparkan proses pelaksanaan kerja sama makroekonomi di forum G20, yang dengan tujuan untuk mencapai sebuah kerangka pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan dan berimbang. Kerangka ini diterjemahkan dalam sebuah mekanisme yang disebut sebagai mutual assessment process, dimana setiap negara anggota menyampaikan komitmen kebijakan mereka di masa mendatang.

Indonesia selama ini telah menunjukkan peran aktif dalam pembahasan isu-isu makroekonomi global, dan telah menyampaikan sejumlah komitmen penting terkait kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan pelaksanaan reformasi struktural. Indonesia kedepannya dapat memainkan peran yang lebih signifikan lagi tidak saja untuk mendukung kepentingan nasional dan program-program reformasi struktural di dalam negeri, namun juga dalam rangka mendukung kepentingan negara berkembang lain yang tidak menjadi anggota G20. Indonesia akan dipandang konsisten dengan terus menyuarakan usulan-usulan yang mampu meningkatkan kapasitas negara berkembang, terutama dalam hal peningkatan kualitas kebijakan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Indrawati, S. M. (2012). Fiscal policy responses to economic crisis: Perspective from an emerging market. In O. Blanchard, D. Romer, M. Spence & J. E. Stiglitz (Eds.), *In the wake of the crisis: Leading economists reassess economic policy* (pp. 67-71). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- International Monetary Fund. (2012). World Economic Outlook April 2012: Growth resuming dangers remain. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Romer, D. (2012). What have we learned about fiscal policy from the crisis? In O. Blanchard, D. Romer, M. Spence & J. E. Stiglitz (Eds.), *In the wake of the crisis: Leading economists reassess economic policy* (pp. 57-66). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Spence, M. (2011). *The next convergence: The future of economic growth in a multispeed world*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- World Economic Forum. (2012). Global risks 2012: Insight report. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.